Jurnal Ruang Sosialia
Volume 02, Number 01, 2026 pp. 92-101
Open Access:

Budaya Lokal dan Akses Pendidikan Formal pada Masyarakat Adat dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Rahma Angraini[1]*

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLEINFO

Article history:
Received Desember 23, 2025
Revised Desember 23, 2025
Accepted Januari 25, 2026
Available online April 03, 2026

Kata Kunci:
Masyarakat Adat, Pendidikan Formal, Budaya Lokal, Kesejahteraan Sosial, Ammatoa Kajang

Keywords:
Indigenous Community, Formal Education, Local Culture, Social Welfare, Ammatoa Kajang

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Al Ghani Cendekia.

ABSTRAK

Pendidikan formal sering diposisikan sebagai instrumen utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial. Dalam konteks masyarakat adat, asumsi tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas sosial dan budaya yang dihadapi komunitas lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara budaya lokal dan akses pendidikan formal pada masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam perspektif kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian yang relevan dengan isu pendidikan, masyarakat adat, dan kesejahteraan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan formal yang tidak kontekstual cenderung berpotensi menimbulkan dislokasi sosial, erosi identitas budaya, serta memperdalam ketimpangan sosial di dalam komunitas adat. Nilai-nilai lokal masyarakat Ammatoa Kajang yang menekankan kesederhanaan, kepatuhan terhadap adat, dan keseimbangan ekologis sering kali tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal yang berorientasi modernitas. Pendidikan formal yang selaras dengan budaya lokal dan melibatkan peran aktif masyarakat adat memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan yang sensitif terhadap budaya lokal sebagai prasyarat terciptanya keadilan sosial dan keberlanjutan dalam masyarakat adat..

ABSTRACT

Formal education is often positioned as a primary instrument for improving human capital and promoting social mobility. In indigenous contexts, however, this assumption does not always align with the social and cultural realities experienced by local communities. This article aims to analyze the relationship between local culture and access to formal education among the Ammatoa Kajang indigenous community from a social welfare perspective. This study employs a literature review method by examining scholarly sources, including national and international journal articles, academic books, and relevant research reports on education, indigenous peoples, and social welfare. The findings indicate that formal education systems lacking cultural contextualization tend to generate social dislocation, cultural identity erosion, and deeper social inequalities within indigenous communities. The local values of the Ammatoa Kajang community, which emphasize simplicity, adherence to customary law, and ecological balance, are often insufficiently accommodated within modern-oriented formal education systems. Formal education that aligns with local culture and actively involves indigenous communities demonstrates greater potential to contribute to sustainable social welfare. This study highlights the importance of culturally responsive education as a fundamental requirement for achieving social justice and sustainability within indigenous societies..

*Corresponding author
E-mail addresses: rahmaangraeni454@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Budaya lokal dan akses pendidikan formal pada masyarakat adat merupakan masalah yang kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan kuantitas akses sekolah tetapi juga dengan kualitas pengalaman pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesejahteraan sosial komunitas yang bersangkutan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak sistem pendidikan formal masih didesain berdasarkan budaya dominan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai, bahasa, dan praktik budaya lokal masyarakat adat, sehingga mereka sering mengalami hambatan struktural dalam memperoleh pendidikan yang bermakna dan kontekstual bagi kehidupan mereka. Akses yang terbatas ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi dan hasil pendidikan yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi yang dialami kelompok adat dibanding kelompok mayoritas.(Cantika et al., 2025)

Pendidikan formal sering dipandang negara sebagai alat utama untuk meningkatkan partisipasi ekonomi dan kesejahteraan sosial, namun literatur menunjukkan bahwa ukurannya selama ini bersifat kuantitatif seperti angka partisipasi dan lama sekolah tanpa mempertimbangkan bagaimana pendidikan itu sendiri diinternalisasi oleh masyarakat adat. Fokus semacam ini berpotensi menghapus atau meremehkan sistem pengetahuan lokal yang justru memiliki fungsi penting dalam struktur sosial dan identitas komunitas adat. Dengan demikian, kesenjangan antara logika pendidikan formal dan makna budaya lokal menjadi sumber alienasi bagi banyak pelajar adat yang berada dalam sistem pendidikan nasional.(Cantika et al., 2025)

Hubungan pendidikan formal dan budaya lokal pada masyarakat adat tidak bisa dilepaskan dari isu representasi budaya di sekolah. Penelitian global menemukan bahwa banyak siswa adat merasa kurang mendapatkan dukungan terhadap identitas budaya mereka di lingkungan sekolah formal, yang berkontribusi terhadap rendahnya rasa memiliki dan motivasi dalam pendidikan. Sikap sekolah yang kurang inklusif terhadap bahasa dan praktik budaya lokal juga berdampak pada tingkat retensi dan prestasi akademik siswa adat, sehingga pendidikan formal justru memperkuat perasaan terasing di antara mereka.(Prehn et al., 2025)

Budaya lokal pada masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan tradisi dan bahasa, tetapi juga dengan nilai-nilai kehidupan komunal, sistem pengetahuan lingkungan, serta cara-cara belajar yang terjadi di luar institusi pendidikan formal. Pengetahuan ini dipertahankan melalui praktik sosial dan pendidikan informal yang terus berlangsung secara turun-temurun, seperti ritual adat dan keterampilan komunitas yang memiliki nilai signifikan bagi kesejahteraan sosial. Tatkala pendidikan formal tidak mengakomodasi bentuk-bentuk pengetahuan ini, maka pendidikan menjadi kurang relevan bagi kehidupan nyata komunitas adat, sehingga memperlebar jurang antara apa yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat tersebut.(Patimah et al., 2020)

Berbagai hambatan struktural, termasuk jarak geografis, kurangnya fasilitas pendidikan, dan rendahnya kualitas tenaga pendidik, semakin memperburuk akses pendidikan formal bagi masyarakat adat yang sering tinggal di wilayah terpencil. Faktor- faktor tersebut berpotensi mempengaruhi partisipasi murid adat dalam sistem pendidikan formal dan berdampak negatif pada mobilitas sosial serta kesejahteraan komunita**s** mereka karena keterbatasan keterampilan formal yang diakui secara luas oleh pasar kerja dan institusi.(Majid et al., 2025)

Faktor budaya juga berperan dalam membentuk persepsi orang tua dan masyarakat terhadap nilai pendidikan formal itu sendiri. Di sejumlah komunitas adat, norma sosial yang kuat terhadap keterlibatan dalam kegiatan keluarga atau pertanian, serta preferensi terhadap pendidikan berbasis keterampilan lokal, dapat mengurangi penekanan pada pendidikan formal yang dianggap kurang relevan atau kurang membawa manfaat langsung. Realitas ini menunjukkan bahwa akses pendidikan formal tidak semata soal hadir di sekolah tetapi juga tentang pemaknaan sosial-budaya atas fungsi pendidikan dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri.(Majid et al., 2025)

Interpretasi budaya lokal dalam konteks pendidikan formal bersinggungan langsung dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia, di mana masyarakat adat sering tidak sepenuhnya menikmati hak mereka atas pendidikan yang sesuai budaya mereka. Diskriminasi dan kurangnya penghormatan terhadap identitas budaya dalam lingkungan formal menjadi salah satu hambatan struktural yang menghalangi pencapaian pendidikan yang setara, yang pada gilirannya berpengaruh pada tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi akademik di kalangan masyarakat adat.(Peoples, n.d.)

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, sejumlah literatur menyarankan perlunya pendekatan pendidikan yang inklusif dan berbasis budaya, yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum serta memfasilitasi penggunaan bahasa adat dalam proses pembelajaran. Pendekatan semacam ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan formal tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya dan kesejahteraan sosial siswa adat dalam jangka panjang.

Perdebatan tentang relevansi budaya lokal dalam sistem pendidikan formal juga mencakup diskusi tentang kontekstualisasi materi ajar, di mana kurikulum nasional yang terlalu seragam seringkali gagal menjawab realitas sosial-budaya spesifik komunitas adat. Ketidaksesuaian semacam ini dapat memicu rendahnya keterlibatan siswa karena materi yang diajarkan kurang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pendidikan formal dirasakan sebagai sesuatu yang terpisah dari lingkungan sosial mereka.

Literatur menegaskan bahwa pendidikan formal yang sensitif budaya mampu menciptakan suasana sekolah yang lebih ramah dan mendukung identitas budaya siswa adat, meningkatkan rasa percaya diri serta keterlibatan dalam proses pembelajaran. Lingkungan sekolah yang menghargai nilai budaya siswa cenderung memfasilitasi hasil akademik yang lebih baik dan mampu mengurangi perasaan marginalisasi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan.(Prehn et al., 2025)

Konsep kesejahteraan sosial dalam konteks masyarakat adat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup yang mencakup pemeliharaan budaya, kesehatan mental, dan keterlibatan dalam kehidupan sosial komunitas. Ketika pendidikan formal tidak mencerminkan atau menghargai dimensi-dimensi budaya ini, manfaat dari pendidikan formal menjadi terbatas dan tidak sepenuhnya berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang holistik bagi masyarakat adat.(Majid et al., 2025)

Tantangan dalam akses pendidikan formal bagi masyarakat adat menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan tidak dapat hanya difokuskan pada penambahan fasilitas fisik atau jumlah sekolah, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi budaya dan sosial yang memengaruhi motivasi, keterlibatan, dan keberlanjutan partisipasi dalam pendidikan. Tanpa perubahan semacam ini, kebijakan pendidikan formal akan terus mengabaikan kebutuhan dan hak masyarakat adat sebagai bagian integral dari masyarakat luas.

Pendekatan yang menyinergikan pendidikan formal dengan praktik budaya lokal dapat berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan akademik, menciptakan ruang belajar yang menghargai identitas siswa serta meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi terhadap pembangunan komunitas secara lebih bermakna. Upaya ini tidak hanya memperkaya pengalaman pendidikan siswa adat tetapi juga memperkuat koneksi antara pendidikan formal dan kesejahteraan sosial masyarakat adat secara keseluruhan.

Literatur kajian pustaka lain menunjukkan bahwa komponen lingkungan belajar yang menghargai budaya turut mendorong keberhasilan pendidikan di kalangan siswa adat, termasuk pengakuan terhadap bahasa ibu dalam proses belajar mengajar dan pengintegrasian praktik budaya dalam kegiatan akademik. Keterlibatan komunitas adat sebagai bagian dari proses pendidikan juga dilihat sebagai strategi penting untuk menjembatani kesenjangan antara sekolah formal dan kehidupan masyarakat adat.(Prehn et al., 2025)

Variasi dalam pengalaman pendidikan masyarakat adat di berbagai negara menekankan bahwa masalah akses pendidikan formal tidak bersifat seragam: konteks budaya, kebijakan nasional, serta praktik sosial lokal semuanya berkontribusi secara kompleks terhadap hasil pendidikan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap pengalaman empiris di

berbagai komunitas adat menyediakan wawasan penting tentang bagaimana pendidikan formal dapat direkonstruksi agar lebih adil dan relevan bagi kesejahteraan sosial mereka.

Konsensus dalam literatur akademik menunjukkan bahwa pendidikan yang tidak sensitif terhadap budaya berisiko memperparah marginalisasi masyarakat adat, sedangkan pendidikan yang mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi, penghargaan identitas budaya, serta peningkatan kesejahteraan sosial dalam komunitas adat. Temuan-temuan ini menegaskan kebutuhan mendesak akan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial dan inklusi budaya dalam rangka mencapai akses pendidikan formal yang bermakna dan berkelanjutan bagi masyarakat adat.(Cantika et al., 2025).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (*literature review*) untuk menganalisis relasi antara budaya lokal dan akses pendidikan formal pada masyarakat adat dalam perspektif kesejahteraan sosial, dengan fokus pada konteks masyarakat adat Ammatoa Kajang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan penafsiran mendalam terhadap konsep, makna, dan dinamika sosial-budaya yang dibangun dalam berbagai penelitian terdahulu, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.

Kajian literatur dilakukan secara sistematis terhadap artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema masyarakat adat, pendidikan formal, budaya lokal, dan kesejahteraan sosial. Literatur dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: relevansi substansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber (jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi), serta keterkaitan empiris atau teoretis dengan konteks pendidikan masyarakat adat, baik di Indonesia maupun secara global. Literatur yang dikaji dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk rujukan teori klasik yang masih relevan secara konseptual.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah daring seperti Google Scholar, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), serta portal jurnal nasional terakreditasi. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui pembacaan judul, abstrak, dan isi artikel untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Dari hasil penelusuran tersebut, sejumlah artikel yang secara langsung membahas pendidikan formal, budaya lokal, dan masyarakat adat dipilih sebagai bahan kajian utama.

Sebagai bentuk transparansi metodologis, artikel-artikel yang menjadi bahan kajian utama disajikan dalam bentuk tabel kajian literatur yang memuat informasi penulis, tahun publikasi, fokus penelitian, temuan utama, dan relevansinya dengan penelitian ini. Penyajian tabel ini bertujuan untuk menunjukkan secara eksplisit sumber-sumber yang dianalisis serta memudahkan penelusuran dan verifikasi akademik.

Tabel 1. Daftar Artikel yang Menjadi Bahan Kajian

Penulis	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
Cantika et al.	2025	Pendidikan formal dan masyarakat adat	Kurikulum pendidikan formal sering mengabaikan nilai budaya lokal sehingga menimbulkan ketegangan antara budaya dan pendidikan	Menguatkan argumen pentingnya integrasi nilai budaya lokal dalam pendidikan

Prehn et al.	2025	Identitas budaya siswa adat di sekolah inklusif	Lingkungan sekolah inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial siswa adat	Mendukung analisis hubungan pendidikan formal dan kesejahteraan sosial
Patimah et al.	2020	Pendidikan informal berbasis budaya lokal	Pendidikan berbasis budaya lokal memperkuat identitas komunitas	Relevan dengan konteks masyarakat Ammatoa Kajang
Majid et al.	2025	Hambatan pendidikan masyarakat adat	Faktor struktural dan budaya memengaruhi akses pendidikan	Memperkuat analisis hambatan akses pendidikan
Siregar	2018	Pendidikan dan kesejahteraan sosial	Pendidikan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara kontekstual	Menjadi landasan perspektif kesejahteraan sosial

Data yang diperoleh dari literatur dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul secara berulang dalam berbagai sumber. Tema-tema tersebut meliputi akses pendidikan formal, peran budaya lokal, posisi masyarakat adat dalam sistem pendidikan, serta implikasi pendidikan terhadap kesejahteraan sosial. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan antarpenelitian dan mengaitkannya dengan kerangka teoretis kesejahteraan sosial dan pendidikan berbasis budaya.

Melalui analisis tematik ini, penelitian berupaya menyusun sintesis kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan berbasis teori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menempatkan masyarakat adat Ammatoa Kajang sebagai subjek sosial yang aktif dalam menegosiasikan makna pendidikan formal dalam kerangka kesejahteraan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Masyarakat Adat dalam Pendidikan

Peran masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam pendidikan memperlihatkan relasi yang khas antara budaya lokal dan sistem pendidikan formal. Masyarakat Kajang memandang pendidikan sebagai bagian dari tatanan hidup yang harus selaras dengan nilai *pasang ri Kajang*, yaitu prinsip adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam, sesama, dan Tuhan. Pendidikan formal dinilai bermakna sejauh tidak bertentangan dengan nilai kesederhanaan, keseimbangan alam, dan kepatuhan terhadap adat, (Fadhel et al., 2021).

Masyarakat adat Ammatoa Kajang tidak menempatkan diri sebagai penerima pasif kebijakan pendidikan, melainkan sebagai komunitas yang secara selektif menyikapi kehadiran sekolah formal. Sikap selektif ini tercermin dalam penerimaan terbatas terhadap praktik pendidikan yang dianggap berpotensi mengganggu tatanan adat. Pendidikan formal diterima sebagai sarana tambahan, bukan sebagai pusat utama pembentukan nilai dan identitas sosial, (Ikbal, n.d.).

Budaya lokal berperan kuat dalam membentuk persepsi masyarakat Kajang terhadap tujuan pendidikan. Nilai kesederhanaan, kejujuran, dan penghormatan terhadap alam menjadi landasan utama dalam proses pembelajaran informal yang berlangsung di lingkungan adat. Pendidikan berbasis adat lebih menekankan pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial dibandingkan pencapaian akademik formal, (Patimah et al., 2020).

Keterlibatan masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam pendidikan lebih tampak pada upaya menjaga agar praktik pendidikan tidak mengikis identitas budaya. Peran tokoh adat menjadi signifikan dalam mengarahkan batas-batas interaksi antara sekolah formal dan kehidupan adat. Pengawasan adat terhadap perilaku generasi muda berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memastikan keberlanjutan nilai budaya di tengah arus pendidikan modern, (Ikbal, n.d.).

Akses pendidikan formal bagi masyarakat Kajang dipengaruhi oleh struktur sosial adat dan pembagian ruang antara kawasan adat dalam dan luar. Masyarakat Kajang Dalam cenderung membatasi interaksi dengan sistem pendidikan formal, sementara masyarakat Kajang Luar menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih terbuka. Perbedaan ini mencerminkan variasi strategi adaptasi budaya terhadap pendidikan formal, (Ikbal, n.d.).

Ketegangan antara pendidikan formal dan budaya lokal muncul ketika kurikulum nasional tidak mempertimbangkan nilai-nilai adat yang dijunjung masyarakat Kajang. Pendidikan formal yang menekankan kompetisi, orientasi material, dan modernisasi sering dipersepsikan bertentangan dengan prinsip hidup sederhana yang dianut masyarakat adat. Kondisi ini memengaruhi partisipasi dan keberlanjutan pendidikan formal di lingkungan Kajang, (Ikbal, n.d.).

Implikasi pendidikan formal terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Ammatoa Kajang tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pendidikan tersebut untuk menghormati struktur adat. Pendidikan yang tidak sensitif budaya berpotensi menciptakan jarak sosial antara individu terdidik dan komunitas adatnya. Pendidikan yang selaras dengan nilai adat justru dapat memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan komunitas, (Wantik et al., 2024).

Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat adat Ammatoa Kajang memiliki peran penting dalam mengontrol arah dan batas pendidikan formal agar tetap sejalan dengan nilai budaya lokal. Pendidikan tidak sepenuhnya ditolak, tetapi dinegosiasikan sesuai dengan prinsip adat yang berlaku. Posisi masyarakat adat sebagai penjaga nilai budaya menjadi faktor kunci dalam menentukan makna pendidikan formal bagi kesejahteraan sosial komunitas Kajang.

3.2 Kontribusi Pengetahuan Lokal

Temuan kajian menunjukkan bahwa pengetahuan lokal masyarakat adat Ammatoa Kajang memiliki peran signifikan dalam membentuk pemahaman pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan tatanan sosial. Pengetahuan tentang pengelolaan hutan adat, pertanian subsisten, serta relasi etis antara manusia dan alam menjadi dasar penting dalam cara masyarakat Kajang memaknai pendidikan. Prinsip *pasang ri Kajang* berfungsi sebagai kerangka nilai yang mengatur perilaku ekologis sekaligus menjadi sumber pembelajaran sosial yang hidup di luar sistem pendidikan formal, (Wantik et al., 2024).

Pengetahuan ekologis masyarakat Kajang tidak dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual. Praktik menjaga keseimbangan alam dipahami sebagai kewajiban sosial dan religius, bukan sekadar teknik produksi. Pendidikan dalam konteks ini dipandang bermakna apabila mampu memperkuat kepatuhan terhadap adat serta menjaga kesinambungan hubungan antara manusia dan lingkungan, (Ikbal, n.d.).

Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun membentuk sistem pembelajaran informal yang kuat di dalam komunitas Kajang. Proses transmisi nilai berlangsung melalui keteladanan, praktik sehari-hari, dan kontrol sosial adat. Pendidikan formal dinilai relevan sejauh tidak mengganggu sistem nilai tersebut dan tidak mendorong pola hidup yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan alam, (Ikbal, n.d.).

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan lokal masyarakat Kajang berpotensi menjadi sumber penting dalam pengembangan kurikulum kontekstual. Integrasi nilai adat ke dalam pendidikan formal berpeluang memperkuat relevansi pendidikan bagi masyarakat adat tanpa menghilangkan identitas budaya. Kurikulum yang mengabaikan realitas sosial dan ekologis Kajang berisiko kehilangan legitimasi di mata komunitas adat.

Partisipasi masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam pengambilan keputusan pendidikan berlangsung secara terbatas dan selektif. Peran tokoh adat lebih diarahkan pada pengawasan nilai dan pembatasan pengaruh pendidikan formal terhadap tatanan adat. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak sepenuhnya menolak pendidikan formal, tetapi menegosiasikan batas penerimaannya, (Patimah et al., 2020).

Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pendidikan tidak bersifat administratif seperti dalam sistem sekolah modern. Otoritas adat memainkan peran sebagai penentu norma sosial yang

mengatur perilaku generasi muda, termasuk dalam hal bersekolah. Pendidikan formal yang melampaui batas adat berpotensi mendapat resistensi sosial.(Patimah et al., 2020)

Peran masyarakat adat Kajang dalam pendidikan lebih menonjol sebagai penjaga nilai daripada sebagai perancang kurikulum formal. Posisi ini mencerminkan perbedaan mendasar antara logika pendidikan negara dan logika pendidikan adat. Pendidikan formal dipandang sebagai instrumen eksternal yang harus dikendalikan agar tidak mengganggu keberlanjutan budaya, (Patimah et al., 2020).

Implikasi partisipasi masyarakat adat terhadap akses pendidikan formal berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial komunitas. Pendidikan yang selaras dengan nilai adat berpotensi memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pendidikan yang mengabaikan kearifan lokal berisiko menciptakan jarak sosial antara individu terdidik dan komunitasnya, (Patimah et al., 2020).

Temuan kajian menegaskan bahwa masyarakat adat Ammatoa Kajang bukan sekadar pemilik pengetahuan lokal, tetapi aktor kultural yang menentukan makna dan batas pendidikan formal. Posisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan formal dalam konteks masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa, nilai budaya, dan tujuan kesejahteraan sosial yang didefinisikan oleh komunitas itu sendiri.

3.3 Pendidikan Formal dan Kesejahteraan Sosial

Pendidikan formal dipahami dalam kajian ilmu sosial sebagai salah satu alat potensial untuk mobilitas sosial, yakni kemampuan individu atau kelompok meningkatkan status ekonomi dan sosialnya melalui akumulasi pengetahuan dan keterampilan. Studi di berbagai komunitas adat menunjukkan bahwa pendidikan formal dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi di luar lingkungan tradisional mereka. Hal ini terutama terlihat ketika pendidikan formal memungkinkan anggota masyarakat adat untuk masuk dalam struktur pasar tenaga kerja yang lebih luas dan kompetitif.(Cantika et al., 2025)

Penelitian pada masyarakat adat Kajang menemukan bahwa mereka yang mengenyam pendidikan formal cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan pengetahuan tradisional, meskipun adaptasi terhadap pendidikan formal tetap penuh dinamika karena ketegangan budaya.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memungkinkan masyarakat mengembangkan kapasitas dirinya sesuai dengan nilai dan struktur sosial yang mereka anut.(Nurintan Asyiah Siregar, 2018) Pendidikan pada masyarakat adat Ammatoa Kajang tidak dapat dilepaskan dari prinsip hidup kamase- masea yang menekankan kesederhanaan, ketaatan pada adat, dan keseimbangan relasi manusia dengan alam. Pendidikan dalam konteks ini tidak dipahami semata sebagai transfer pengetahuan teknis, melainkan sebagai proses sosial yang harus selaras dengan tatanan adat yang telah mengatur kehidupan kolektif masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat menjadi prasyarat penting agar akses terhadap pendidikan formal tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas budaya lokal. Masyarakat adat Ammatoa Kajang memandang pendidikan sebagai bagian dari sistem nilai yang harus tunduk pada otoritas adat, simbol budaya, serta pembagian wilayah adat ilalang embayya dan ipantarang embayya. Pendidikan yang tidak menghormati batas-batas tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan penolakan kultural.

Keberhasilan pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan sangat ditentukan oleh proses sosial yang menyertainya. Pendidikan yang hanya berorientasi pada capaian hasil seperti sertifikasi atau peningkatan keterampilan kerja cenderung kehilangan makna sosial ketika diterapkan tanpa proses dialog budaya. Masyarakat Ammatoa Kajang menempatkan legitimasi tokoh adat sebagai fondasi utama dalam menerima program pendidikan. Proses pengenalan, penerimaan, dan persetujuan adat menjadi tahapan yang tidak dapat diabaikan.(Cantika et al., 2025)

Pemberdayaan melalui pendidikan seringkali diasumsikan identik dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya relevan dalam konteks

masyarakat adat Ammatoa Kajang. Kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kemampuan menjaga harmoni sosial, kelestarian lingkungan, dan kepatuhan terhadap adat. Pendidikan yang mendorong mobilitas sosial tanpa mempertimbangkan makna kesejahteraan lokal justru berisiko menciptakan dislokasi sosial.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat seperti kepedulian terhadap kebutuhan lokal, kepercayaan timbal balik, partisipasi, dan fasilitasi negara secara konseptual memiliki relevansi. Penerapan prinsip tersebut pada masyarakat Ammatoa Kajang menuntut penyesuaian struktural. Partisipasi masyarakat tidak dimaknai sebagai keterlibatan individual bebas, melainkan melalui mekanisme kolektif yang diatur oleh struktur adat yang hierarkis dan simbolik.

Permasalahan pendidikan pada masyarakat adat tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan fasilitas atau dukungan operasional. Legitimasi budaya menjadi faktor penentu keberlanjutan pendidikan. Program pendidikan yang dirancang tanpa keterlibatan tokoh adat cenderung bersifat temporer dan tidak berakar dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan pendidikan sering kali bersumber dari ketidaksensitifan terhadap konteks sosial-budaya.

Pendidikan nonformal memiliki potensi strategis sebagai ruang pertemuan antara pengetahuan adat dan pengetahuan modern. Fungsi tersebut hanya dapat berjalan apabila pendidikan nonformal tidak diarahkan untuk menggantikan nilai adat, melainkan memperkuat kapasitas hidup masyarakat sesuai dengan logika lokal. Pengelolaan sumber daya alam, kesehatan komunitas, dan literasi dasar menjadi contoh ruang pemberdayaan yang sejalan dengan prinsip adat.

Perencanaan pendidikan yang melibatkan tokoh adat dan komunitas menjadi syarat utama bagi terciptanya pendidikan yang relevan secara sosial. Ketiadaan pelibatan tersebut menyebabkan pendidikan dipersepsikan sebagai proyek eksternal yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menjelaskan mengapa banyak program pendidikan gagal berkelanjutan di wilayah adat.

Pelaksanaan pembelajaran yang demokratis dalam masyarakat adat tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Demokrasi pendidikan dipahami sebagai kesesuaian dengan kesepakatan adat dan nilai kolektif yang hidup dalam komunitas. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas fisik, tetapi dari keselarasan antara isi pendidikan dan struktur budaya masyarakat.

Keberhasilan pendidikan sebagai instrumen kesejahteraan sosial pada masyarakat Ammatoa Kajang lebih ditentukan oleh sensitivitas budaya dibandingkan oleh pendekatan teknokratis. Pendidikan yang mengabaikan dimensi adat berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan melemahkan identitas budaya. Pendidikan yang berakar pada budaya lokal justru membuka ruang kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan kontekstual.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan formal dalam konteks masyarakat adat Ammatoa Kajang, berdasarkan kajian pustaka yang dianalisis, tidak dapat diposisikan semata sebagai instrumen peningkatan kapasitas individual, melainkan sebagai proses sosial yang berinteraksi langsung dengan sistem nilai adat, struktur kekuasaan lokal, dan konsep kesejahteraan kolektif. Kajian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan formal yang dirancang secara seragam dan berorientasi modernitas sering kali berbenturan dengan prinsip hidup masyarakat Ammatoa Kajang yang menjunjung kesederhanaan, kepatuhan terhadap adat, serta keseimbangan hubungan manusia dan alam. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan formal yang tidak berangkat dari konteks budaya lokal berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan gagal berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat adat secara menyeluruh.

Pendidikan formal kerap dipahami sebagai sarana mobilitas sosial yang bersifat universal. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak sepenuhnya relevan bagi masyarakat Ammatoa Kajang. Pendidikan yang mendorong orientasi individualistik, kompetisi,

dan mobilitas ekonomi keluar komunitas justru berisiko memicu dislokasi sosial, melemahkan kohesi komunitas, serta mempercepat erosi identitas budaya. Fenomena ini memperkuat kritik Bourdieu (1986) mengenai fungsi pendidikan dalam mereproduksi ketimpangan sosial, sekaligus sejalan dengan kajian Kuokkanen (2007) yang menyoroti marginalisasi pengetahuan adat akibat dominasi sistem pendidikan modern.

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang dimaknai secara kolektif dan ekologis, tidak semata-mata diukur melalui capaian ekonomi atau jenjang pendidikan formal. Pendidikan yang tidak kontekstual justru berpotensi memperdalam ketimpangan internal dengan menciptakan jarak simbolik antara individu terdidik dan komunitas adatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan formal perlu dipahami dalam kerangka kapabilitas sosial yang menghargai kebebasan hidup sesuai nilai budaya lokal, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan pembangunan manusia berbasis kapabilitas.

Pengetahuan lokal masyarakat adat Ammatoa Kajang terbukti merupakan sumber daya epistemik yang strategis dalam membangun pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Integrasi nilai adat, etika lingkungan, serta struktur sosial lokal ke dalam pendidikan formal menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi pendidikan sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat adat. Temuan ini menguatkan argumen bahwa pengakuan terhadap pengetahuan adat bukan hanya bersifat kultural, tetapi juga merupakan prasyarat bagi keadilan sosial dalam sistem pendidikan.

Pengembangan pendidikan formal di wilayah masyarakat adat Ammatoa Kajang perlu diarahkan pada pendekatan berbasis budaya yang memberi ruang adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan tujuan pendidikan sesuai dengan nilai adat setempat. Pelibatan tokoh adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan menjadi prasyarat utama agar pendidikan memperoleh legitimasi sosial dan tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan adat. Pendidikan nonformal berbasis komunitas adat perlu diperkuat sebagai ruang transisi yang memungkinkan masyarakat mengakses pengetahuan modern tanpa kehilangan identitas budaya. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Castagno dan Brayboy (2008) serta UNESCO Institute for Lifelong Learning (2016) yang menekankan pentingnya pendidikan partisipatif dan berbasis masyarakat adat.

Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan formal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat adat tidak ditentukan oleh tingkat akses semata, tetapi oleh sejauh mana pendidikan tersebut mampu bernegosiasi secara adil dengan budaya lokal, menjaga keberlanjutan sosial-ekologis, serta menghindari reproduksi ketimpangan struktural. Pendidikan yang sensitif budaya dan berorientasi kesejahteraan kolektif bukan hanya menjadi pilihan normatif, tetapi merupakan kebutuhan empiris dalam konteks masyarakat adat Ammatoa Kajang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Cantika, V. M., Hernawan, A. H., S Dewi, L. (2025). *Pendidikan Masyarakat Adat dalam Kerangka Kurikulum Indonesia*. *10*(1), 682–690.

Fadhel, A., Akhmad, M. A., Jannah, A. M., Azizah, R., S Makassar, U. M. (2021). *Pasang Ri Kajang Sebagai Media Pendidikan Karakter Berwawasan Lingkungan Di Kawasan Adat Ammatoa*. *1*.

Ikbal, M. (n.d.). *Pendidikan Formal Masyarakat Adat Kajang*. *5*(3), 30–38.

Majid, S., Romeo, N., Fathiah, N., Ahmad, A., Hazwani, N., Aziz, A., Amin, M., Rahman, A., Nabil, M., Suhaimi, N., S Author, C. (2025). *Exploring Learning Potential Through artSMart 8 : Perspectives of Mathematics Teachers in Indigenous Schools*. *IX*(Xxiv), 138–144. https://doi.org/10.47772/IJRISS

Nurintan Asyiah Siregar, Z. R. (2018). *Analisis tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap kesejahteraan sosial di kabupaten labuhanbatu*. *6*(1).

Patimah, I., Tahir, T., Hasan, M., Ekonomi, P., S Makassar, U. N. (2020). *Pendidikan Informal Berbasis Budaya Lokal Pada Masyarakat Adat Kajang*. *1*(November), 55–60.

Peoples, I. (n.d.). *Department of Economic and Social Affairs*. 1–11.

Prehn, J., Guerzoni, M., S Graham, J. (2025). Nurturing cultural identity : creating an inclusive school environment for Indigenous youths. *The Australian Educational Researcher*, *52*(2), 861–877. https://doi.org/10.1007/s13384-024-00781-6

Wantik, L., Laksmono, B. S., S Lefaan, A. (2024). *Education System for Indigenous Communities : A Review of Social Ecology*. *3*(10), 1593–1604.